



**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019
PADA
RAPAT PARIPURNA DPR-RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Jakarta, 31 Oktober 2018

Yang Terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Hadirin yang berbahagia,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namó Buddhaya

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat memenuhi tugas konstitusional, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019. Berkenaan dengan itu, kami menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Pemerintah mengucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi, komisi dan Badan Anggaran DPR-RI, yang telah melaksanakan proses pembahasan RUU APBN tahun 2019 dengan berbagai pandangan, masukan dan saran yang konstruktif, sehingga dapat dicapai kesepakatan APBN tahun 2019.

Pembahasan RUU APBN tahun 2019 ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi geopolitik yang sangat menantang, dan ekonomi global yang mengalami perubahan secara fundamental paska krisis keuangan global sepuluh tahun lalu. Hal ini mengakibatkan tantangan gejolak arus modal global yang tidak mudah dan berimplikasi pada perubahan asumsi makro dan alokasi anggaran belanja. Proses pembahasan RUU APBN tahun 2019 berjalan sangat dinamis diantara kelengkapan DPR maupun antara DPR dengan Pemerintah.

DPR memiliki hak *budget* sesuai amanat konstitusi yang diatur dalam Undang-undang, serta dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dari daerah pemilihannya. Dengan semangat transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas konstitusi dan tetap mentaati landasan hukum yang mengatur penyusunan APBN, termasuk UU MD3 dan UU Keuangan Negara, Pemerintah berterima kasih kepada DPR yang telah menyetujui penyelesaian RUU APBN tahun 2019 sesuai ketentuan perundangan.

Pemerintah meyakini bahwa semangat bersama antara Pemerintah bersama DPR untuk menyusun APBN tahun 2019 sebagai instrumen yang kredibel, berkelanjutan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan tujuan bernegara sesuai harapan masyarakat, merupakan tugas yang harus terus dijaga dan diperjuangkan bersama. Semangat untuk mengatasi berbagai masalah bangsa dan keinginan untuk memacu pembangunan secara merata dan cepat, tetap disandingkan dengan prinsip kehati-hatian serta menjaga kesinambungan kemajuan dari instrumen keuangan negara secara berkelanjutan.

Proses pembahasan RAPBN berujung pada kesepakatan mengenai besaran penerimaan negara, alokasi anggaran untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan dan investasi. Kesepakatan ini merupakan refleksi dari semua niat dan keinginan kita untuk memajukan negara, yang tertuang dalam berbagai kebijakan yang diambil untuk mendukung investasi, pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kelompok paling rentan, serta menjaga stabilitas perekonomian ditengah gejolak ekonomi global yang sangat menantang.

APBN tahun 2019 juga disepakati sebagai instrumen untuk terus menjaga keamanan dan stabilitas nasional dalam menyukseskan pesta demokrasi tahun 2019. Pemerintah berharap pelaksanaan APBN tahun 2019 dilakukan dengan menjaga secara teguh tata kelola yang baik dan disertai semangat bebas korupsi, baik di sisi Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pada sisi DPR, sehingga rakyat dan bangsa Indonesia mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya APBN tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagai konsekuensi dari perekonomian terbuka dan hubungan antar negara yang saling terkait, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dinamika global. Hal ini tidak berarti bahwa perekonomian dan APBN dalam kondisi rentan. Justru dengan strategi dan kebijakan yang tepat, kita dapat memanfaatkan hubungan antar negara dan keterbukaan ekonomi untuk memacu kemajuan ekonomi dan sosial kita. Sejarah negara-negara Asia atau bahkan dunia Barat yang mencapai kemajuan ekonomi, semuanya selalu mengadopsi dan memanfaatkan keterbukaan dan kompetisi yang sehat. APBN sebagai instrumen pembangunan menjadi sarana yang strategis untuk mempersiapkan dan memperkuat Indonesia dalam mengatasi tantangan dan sekaligus memanfaatkan dinamika perekonomian global. Dengan kebijakan fiskal yang tepat dan konsisten disertai

kebijakan struktural dari kementerian dan lembaga lainnya, kita dapat memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Dalam suasana gejolak global, APBN sebagai alat stabilisasi, alokasi dan distribusi dapat menjadi instrumen untuk menjaga fundamental ekonomi nasional tetap sehat dan stabil, dan tetap memberikan stimulasi bagi perekonomian nasional dan memberikan jaring pengaman yang baik. Untuk menjadi instrumen stabilisasi, alokasi dan distribusi yang efektif dan kredibel, APBN harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya. Hal ini yang sudah dan sedang dan akan terus dilakukan pemerintah melalui postur APBN dengan tingkat defisit yang semakin menurun dan keseimbangan primer mendekati nol. Desain APBN 2019 menggambarkan optimisme namun dengan tetap menjaga kehati-hatian karena memang lingkungan yang kita hadapi penuh tantangan. Kehati-hatian dan kewaspadaan tidak berarti perekonomian dan APBN kita rapuh, justru kita bersikap demikian untuk menjaga perekonomian yang sedang memiliki momentum positif agar tidak menjadi rapuh dan rentan.

Tantangan nyata pada tahun mendatang adalah perekonomian dunia masih dibayangi oleh ketidakpastian, antara lain bersumber dari Amerika Serikat yang melakukan normalisasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang *pro-cyclical*, yang menyebabkan kenaikan suku bunga dan imbal hasil (*yield*) surat berharga Amerika yang berimbas ke seluruh dunia, penguatan dollar Amerika Serikat dan pengetatan likuiditas yang menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara *emerging* yang menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu perang dagang AS dan Tiongkok, ketidakpastian skenario Brexit dan di berbagai negara Eropa, serta ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia menyebabkan meningkatnya risiko negatif bagi ekonomi global. IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,7 persen, dari sebelumnya sebesar 3,9 persen. Demikian pula tingkat perdagangan dunia yang diturunkan menjadi sebesar 4,0 persen dari sebelumnya 4,5 persen.

Dengan meningkatnya risiko negatif dari perekonomian global, kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjaga perekonomian nasional. Untuk itu, penetapan target-target perekonomian kita harus diperhitungkan secara lebih realistis, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global, sehingga kebijakan fiskal melalui APBN 2019 menjadi kredibel dan efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang merata dan penurunan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi tahun depan masih bersumber dari konsumsi rumah tangga yang diharapkan tetap tumbuh stabil, serta pertumbuhan investasi yang menunjukkan momentum pemulihan, meskipun risiko kenaikan suku bunga, nilai tukar dan lingkungan global akan menjadi tantangan. Demikian juga ekspor yang diharapkan akan tumbuh dengan memanfaatkan harga komoditas, kebijakan yang mendorong ekspor, serta meningkatnya daya saing produk manufaktur.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen. Pemerintah juga akan tetap terus mengantisipasi potensi *downside risk* terhadap pertumbuhan ekonomi yang mungkin terjadi. Dalam hal ini Pemerintah meyakini bahwa mengelola stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang merupakan fondasi penting untuk menjaga kesinambungan kemajuan ekonomi melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan perbaikan kualitas kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Perubahan sentimen global yang sangat tinggi dan berjalan sangat cepat pada tahun ini, mempengaruhi arus modal ke negara *emerging* dan menguatnya mata uang dollar Amerika. Hal ini mengharuskan kita untuk menyesuaikan asumsi nilai tukar rupiah secara cepat dan tepat. Pemerintah mengapresiasi persetujuan DPR atas perubahan asumsi nilai tukar rupiah menjadi rata-rata Rp15.000 per dollar AS. Perubahan asumsi nilai tukar tersebut menjadi lebih sejalan dan kredibel sesuai tantangan dan kondisi neraca pembayaran Indonesia saat ini dan ke depan. Kerjasama dan dukungan DPR untuk menyusun APBN tahun 2019 yang realistis dan kredibel sangat kami hargai.

Selanjutnya, sebagaimana laporan Ketua Badan Anggaran tadi, secara lengkap besaran asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi 5,3 persen; (2) inflasi 3,5 persen; (3) nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat Rp15.000/US\$; (4) tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia US\$70 per barel; (6) *lifting* minyak bumi 775 ribu barel per hari; dan (7) *lifting* gas bumi 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan asumsi dasar ekonomi makro tersebut, serta berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh di tahun 2019 mendatang, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.461,1 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp296,0 triliun, atau setara dengan 1,84 persen dari PDB. Defisit ini merupakan yang terendah sejak lima tahun terakhir, mencerminkan

kuatnya kesepahaman Pemerintah dan DPR untuk menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Meskipun defisit APBN tahun 2019 ditetapkan lebih rendah dari perkiraan defisit APBN di tahun 2018, namun Pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, sehingga tetap memberikan dorongan yang optimal bagi perekonomian nasional.

Pada sisi pendapatan negara, target penerimaan perpajakan tahun 2019 disepakati sebesar Rp1.786,4 triliun. Target penerimaan perpajakan tersebut secara nominal tumbuh 15,4 persen dari *outlook* realisasi APBN tahun 2018, cukup menantang namun realistis untuk dicapai. Strategi dan kebijakan perpajakan tahun 2019 adalah dengan melakukan penggalan sumber pendapatan negara dengan tetap mendukung iklim investasi dan daya saing ekspor, serta terus mendorong peningkatan kepatuhan, melalui reformasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. Dorongan terhadap perekonomian dilakukan dengan pemberian insentif perpajakan, seperti *tax holiday* dan *tax allowance*, juga insentif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan kebijakan tersebut diharapkan *tax ratio* tahun 2019 dapat mencapai 12,2 persen terhadap PDB.

Di bidang kepabeanan dan cukai, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan teknis antara lain berupa penyempurnaan penggunaan teknologi informasi (IT), intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan, serta pemberantasan penyelundupan.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp378,3 triliun atau naik 8,3 persen terhadap perkiraannya di APBN tahun 2018. Perubahan regulasi PNBP dengan ditetapkannya UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP merupakan tonggak baru perbaikan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNBP. Kebijakan PNBP tahun 2019 diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan aset, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik dan menjaga kelestarian lingkungan.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Kami Hormati,

Belanja Negara dalam APBN tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp2.461,1 triliun atau meningkat 11,0 persen dari perkiraannya di tahun 2018, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.634,3 triliun dan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun.

Alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2019 tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, penguatan birokrasi yang efisien dan efektif, serta antisipasi ketidakpastian termasuk mitigasi risiko bencana. Pemanfaatan belanja ini harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, agar setiap rupiah belanja dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai prinsip *value for money*.

Pemerintah sepakat dengan Dewan bahwa APBN tahun 2019 harus memberi perhatian pada masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Untuk itu, dalam APBN tahun 2019 disepakati kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM serta melanjutkan dan memperkuat program perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Kebijakan-kebijakan itu bukanlah pengeluaran yang bersifat *charity*, namun merupakan wujud nyata optimalisasi peran APBN sebagai instrumen distribusi yang efektif. Penguatan perlindungan sosial tahun 2019 didukung alokasi anggaran sebesar Rp385 triliun, antara lain melalui program bantuan sosial, dana desa, subsidi, dan dukungan pengembangan KUKM. Untuk meningkatkan efektivitasnya, maka program-program perlindungan sosial yang ada terus disinergikan, sehingga dapat tersalurkan sesuai dengan ketentuan dan karakteristik penerima manfaat.

Pemerintah sangat menyambut baik perhatian yang sangat besar dari Anggota Dewan atas pengembangan kualitas SDM Indonesia sejalan dengan alokasi anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan yang terus meningkat, hingga masing-masing mencapai Rp123,1 triliun dan Rp492,5 triliun. Kita harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan agar benar-benar membaik dan tidak tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Kami menghargai perhatian Dewan terhadap pembangunan perpustakaan dan penelitian, untuk memperluas akses terhadap literatur yang bermutu untuk meningkatkan pengetahuan dan penguatan kegiatan riset. Hal ini agar dapat meningkatkan kemampuan berinovasi untuk mendukung kebutuhan industri, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah terhadap perekonomian.

Pemerintah juga mengapresiasi persetujuan DPR atas kenaikan alokasi dana untuk PKH, yang dalam tahun 2019 manfaat yang diterima keluarga miskin meningkat dua kali lipat. Hal ini sejalan dengan langkah yang telah ditempuh selama ini untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, mengingat PKH merupakan alat yang paling efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, Pemerintah juga sepakat dengan Anggota Dewan untuk memperbaiki basis data terpadu.

Selanjutnya, Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk mengantisipasi dampak bencana, termasuk dengan mengembangkan kerangka pendanaan risiko bencana. Untuk itu, Pemerintah sangat menghargai persetujuan Dewan terhadap alokasi dana untuk mendukung pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah dalam APBN tahun 2019. Di samping pendanaan yang berbasis APBN untuk kegiatan *ex-post*, pada tahun 2019 juga akan dikembangkan skema transfer risiko bencana, dengan melanjutkan asuransi pertanian dan asuransi nelayan, serta melakukan *piloting* untuk asuransi barang milik negara.

Selain itu, untuk mengantisipasi kebutuhan dana untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam, akan dibentuk *pooling fund* bencana yang bersumber dari APBN, serta dapat melibatkan daerah, pinjaman dan hibah luar negeri, serta sumber-sumber lain, yang dikelola secara khusus. Dengan skema pembiayaan yang fleksibel dan langkah-langkah antisipasi risiko bencana yang terintegrasi dan komprehensif, maka diharapkan Indonesia akan lebih siap dalam menghadapi kebutuhan anggaran penanganan bencana. Pemerintah akan terus mengembangkan mekanisme asuransi dan anggaran penanganan bencana berbasis risiko dan memberikan kepastian anggaran bagi daerah terkena bencana. Dukungan Dewan untuk mewujudkan hal tersebut akan sangat penting.

Selanjutnya, dalam pembahasan juga disepakati tambahan belanja mendesak untuk beberapa Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan di tahun 2019, terutama kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 dengan dukungan keamanan yang lebih baik. Pemerintah bersama anggota Dewan sepakat agar pengalokasian belanja tersebut digunakan dengan baik dan bebas korupsi yang tercermin dari kesepakatan atas kriteria-kriteria pemanfaatan belanja. Kriteria tersebut mencakup penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel, menghasilkan *output* dan *outcome* terukur, serta memperkuat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk itu, Pemerintah akan mengawal kesepakatan tersebut dalam pelaksanaannya.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada tahun 2019 telah ditetapkan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

tersebut diharmonisasikan dengan kebijakan belanja melalui kementerian/lembaga, serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, sekaligus mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

Sebagai bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah mengapresiasi persetujuan DPR untuk mengalokasikan DAU yang tetap atau bersifat final. Kebijakan itu perlu dilakukan guna memberi kepastian bagi pemerintah daerah, mengingat sampai saat ini sebagian besar daerah sumber pendapatan masih sangat bergantung dari DAU. Dengan adanya kepastian itu, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih efektif dalam mengelola APBD, termasuk mengoptimalkan penggunaan DAU untuk mendanai pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengakomodasi berbagai masukan untuk menganggarkan bantuan pendanaan kelurahan dalam APBN, melalui alokasi DAU Tambahan sebesar Rp3,0 triliun sebagai dukungan pendanaan bagi 8.212 kelurahan. Namun demikian, Pemerintah Daerah harus tetap menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBD, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Dengan adanya dukungan pendanaan kelurahan dari APBN melalui DAU dan juga dari sumber pendapatan APBD lainnya, maka akan memberikan dampak positif bagi percepatan penanganan permasalahan pembangunan di perkotaan pada umumnya, dan kelurahan pada khususnya, melalui pembangunan sarana dan prasarana dasar dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari anggota Dewan yang terhormat, khususnya untuk menjaga agar alokasi DAK Fisik yang meningkat cukup signifikan menjadi Rp69,3 triliun, selaras dengan kebutuhan daerah dalam mengejar ketertinggalan pembangunan dan target pencapaian prioritas nasional. Pemerintah memahami tugas DPR untuk memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakili. Pemerintah juga sangat mengapresiasi dukungan para anggota Dewan untuk terus berkomitmen dalam menjaga agar seluruh proses pengalokasian dan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berjalan dengan baik, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan bebas dari korupsi serta konflik kepentingan.

Kami akan mengupayakan untuk langkah pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran transfer ke daerah di lingkungan pemerintah, baik di

pusat maupun di daerah dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, dengan menerapkan asas transparansi dan keterbukaan, perkuatan *check and balance*, dan meningkatkan peran pengawasan dan pengendali internal maupun institusi pencegah korupsi dan penegak hukum lainnya. Kami berharap DPR akan menjadi mitra sejalan dalam memerangi korupsi terhadap anggaran transfer ke daerah dan dana desa di seluruh proses anggaran dan pelaksanaannya.

Terhadap penggunaan belanja di daerah tersebut, Pemerintah terus mendorong agar dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif berdasarkan prinsip *value for money*. Untuk itu, Pemerintah akan melakukan penguatan pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian atas pemanfaatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Hal ini penting guna memastikan bahwa alokasi anggaran yang besar tersebut, termasuk alokasi dana desa sebesar Rp70 triliun, benar-benar digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat meningkatkan sarana dan prasarana desa dan kesejahteraan masyarakat desa, dan sekaligus sebagai *feedback* untuk perbaikan kebijakan alokasi pada tahun mendatang.

Saudara Pimpinan, Para Anggota Dewan, dan hadirin yang terhormat,

Menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi, baik domestik maupun global, pembiayaan APBN tahun 2019 akan dilaksanakan secara hati-hati dan risiko yang terukur. Kesehatan dan kemandirian APBN tahun 2019 dicerminkan dengan keseimbangan primer yang semakin kecil menuju nol, serta defisit dan pembiayaan utang yang menurun, sehingga rasio utang terkendali dalam batas aman.

Dapat kami sampaikan kembali bahwa pembiayaan melalui utang hanya merupakan “alat” dan menjadi bagian dari instrumen fiskal untuk menuju tujuan pembangunan yang menjadi cita-cita bangsa. Pembiayaan utang tahun 2019 menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan APBN yang semakin sehat dan mandiri. Pembiayaan juga akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk memacu perekonomian, dengan mendorong peningkatan peran swasta, BUMN dan BLU untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, melalui skema pembiayaan kreatif dan inovatif.

Selanjutnya, pembiayaan anggaran tahun 2019 juga dioptimalkan sebagai instrumen untuk memperkuat inovasi dan teknologi. Hal itu tercermin dari kesepakatan untuk mengalokasikan dana abadi penelitian yang merupakan bagian dari 20 persen anggaran untuk pendidikan. Dana ini diharapkan akan mampu membiayai lebih banyak kegiatan penelitian, yang hasilnya dapat

bermanfaat bagi inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri.

Hadirin yang saya hormati,

Dengan seluruh arah, upaya, dan strategi yang akan diambil pada tahun 2019 tersebut, baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, maka pengelolaan fiskal tahun 2019 akan semakin sehat dan berkualitas, dengan risiko yang lebih terkendali. Hal ini terefleksi pada defisit pada APBN tahun 2019 yang terjaga pada batas aman di kisaran 1,84 persen terhadap PDB atau sebesar Rp296,0 triliun, lebih rendah dari *outlook* tahun 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB atau Rp314,2 triliun.

Defisit APBN tahun 2019 tersebut dijaga lebih rendah untuk menjaga *fiscal sustainability*, disertai dengan rencana penarikan utang yang semakin menurun dan secara terukur, dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai standar internasional.

Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mencapai Rp20,1 triliun, yang jauh lebih rendah dibandingkan perkiraannya di APBN tahun 2018. Defisit keseimbangan primer yang konsisten turun menuju positif ini memberikan bukti kuat sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur yang tepat. Dengan tantangan kenaikan suku bunga global dan pengetatan likuiditas global, kita akan semakin hati-hati mengelola defisit APBN dan utang negara. Program pendalaman pasar obligasi negara dan perkuatan basis investor dalam negeri akan menjadi prioritas untuk meningkatkan daya tahan keuangan negara dan perekonomian Indonesia.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2019. Pemerintah sangat memahami berbagai pandangan, kritik, dan masukan yang membangun dari semua Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini akan menjadi masukan bagi Pemerintah untuk terus melakukan perbaikan. Pemerintah juga tidak akan pernah berhenti untuk terus bekerja dan melakukan langkah-langkah nyata untuk pembangunan Negara Indonesia yang kita cintai demi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan.

Pada akhirnya, perkenankanlah kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan

para anggota di Badan Anggaran dan Komisi DPR RI, atas persetujuannya dalam menyepakati hal-hal yang sangat penting dan strategis dalam APBN tahun 2019.

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita panjatkan doa semoga langkah-langkah kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 31 Oktober 2018

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati